

ANALISIS PEMETAAN PERMASALAHAN PEMBUKUAN UMKM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Beni Suhendra Winarso
Indah Kurniawati
Universitas Ahmad Dahlan

Siti Resmi
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta
indahmila@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to map the condition of MSMEs in the Special Region of Yogyakarta. This study uses MSME respondents in DIY. The selection of respondents was based on the rapid development of MSMEs and was proven to have survived during the monetary crisis and various eruptions and earthquakes. The number of respondents in this study is 65 MSMEs. Data collection is done through questionnaires and direct interviews with respondents. The results of the study show that the MSMEs studied were micro-business groups based on the criteria of the Central Bureau of Statistics and the UMKM Law. Another result of this study is the level of knowledge of MSMEs in terms of accounting is very limited so that the financial statements produced are not in accordance with the standards. A further consequence is that banks doubt financial information made by borrowers. The implication of this research is that the government must educate MSMEs in understanding financial statements. The results of the study in the form of mapping of bookkeeping for MSMEs can be the basis for further research. Research on understanding accounting can be done using experimental methods so that MSMEs can apply research results to their business decision making.

Keyword: micro small and medium enterprises, accounting, mapping

PENDAHULUAN

Pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah UMKM terus meningkat, yaitu dari tahun 2015, 2016, 2017 masing-masing adalah 220.703, 230.047 dan 238.619. (www.depkop.go.id). Sebaran UMKM masing-masing kabupaten/kota di DIY menunjukkan jumlah bervariasi,

yaitu 26% untuk Kabupaten Bantul, 20% untuk Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta 14% untuk Kota Yogyakarta, 22% untuk Kabupaten Gunungkidul, dan 18% untuk Kabupaten Sleman. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian di DIY (<http://krjogja.com/>, diakses 22 Desember 2017). Hal ini terbukti tingginya kontribusi UMKM pada perekonomian DIY yaitu sebesar 96% (Disperingkop DIY). Sebaran jenis usaha diklasifikasikan menjadi: 1) usaha mikro sebesar 55%, 2) usaha kecil sebesar 25%, 3) usaha

menengah sebesar 15%, 4) sisanya 5% adalah perusahaan besar.

Pertambahan jumlah UMKM tersebut tidak diiringi dengan kualitas UMKM dari sisi pemasaran, sumberdaya, teknologi, legalitas dan dari sisi permodalan. UMKM memiliki permasalahan atau kendala dalam rangka meningkatkan atau mengembangkan usahanya. Diberlakukannya masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut para pelaku UMKM diharuskan memiliki kemampuan bersaing dengan pelaku usaha di negara ASEAN lainnya. Daya saing UMKM yang kuat merupakan faktor kunci bagi keberhasilan UMKM dalam menghadapi tantangan di MEA. Inpres No 6 tahun 2014 menyatakan, salah satu usaha untuk meningkatkan daya saing dalam rangka menghadapi MEA adalah pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang difokuskan pada: 1) Peningkatan daya saing UMKM dari sisi pembiayaan, 2). Pengembangan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka peningkatan legibilitas dan kapabilitas daya saing UMKM, 3) mendorong pemberdayaan sektor riil dan daya saing UMKM.

Produktivitas rendah dan kualitas SDM UMKM minim dalam manajemen dan organisasi, penguasaan teknologi terbatas dan pemasaran, lemahnya jiwa kewirausahaan, minimalnya akses UMKM terhadap permodalan, dan keterbatasan informasi teknologi dan pasar adalah permasalahan klasik yang dihadapi UMKM. Hal itu menjadi kendala bagi pelaku UMKM untuk dapat meningkatkan daya saing (Riani, 2011).

Program bantuan permodalan kepada UMKM diperlakukan secara khusus dan lunak, misalnya dengan bunga pinjaman rendah, persyaratan administrasi mudah, tanpa jaminan, proses pengajuan dan pencairan cepat, dan kemudahan lainnya. Rudiantoro dan Siregar (2011) menjelaskan bahwa salah satu upaya pemerintah dalam mendorong perkembangan UMKM adalah melalui program pembiayaan

UMKM. Program tersebut dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementrian KUKM maupun melalui pihak perbankan. Pemerintah melalui perbankan memberikan fasilitas bantuan permodalan bagi UMKM dengan berbagai program, misalnya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan program yang sangat populer dengan tujuan membantu mempermudah UMKM dalam mengakses permodalan melalui bank.

Di sisi lain, UMKM cenderung mengembangkan usaha dengan modal sendiri dan hasil usaha yang diperolehnya (Alhusain, 2014). Pelaku UMKM menganggap bahwa usaha yang dilakukan bertujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dengan adanya pinjaman bank akan menambah beban dalam mengangsur pokok pinjaman dan membayar bunga. Mereka merasa bahwa meminjam uang di bank harus memenuhi persyaratan yang rumit karena harus menyusun laporan keuangan dan persyaratan yang lain.

Persepsi UMKM tersebut berakibat program KUR tidak memenuhi target dan kurang termanfaatkan dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi yang memadai berupa laporan keuangan yang dihasilkan (Rudiantoro dan Siregar, 2011). UMKM mengelola usaha tidak secara profesional. Norma-norma dalam pengelolaan keuangan khususnya pembukuan tidak dipatuhi. Pembukuan yang seharusnya memisahkan aset, utang, pendapatan, dan beban pemilik dan perusahaan tidak dilakukan. Informasi berkaitan dengan pengelolaan usaha UMKM dapat dilihat dari laporan keuangan. Dalam laporan keuangan tersebut, perbankan dapat mengetahui kondisi dan kinerja finansial UMKM. Perbankan menilai bahwa informasi akuntansi UMKM menjadi mahal karena tidak mudah diperoleh (Baas dan Schooten, 2006). Rahmawati dan Oktaviani (2017) menemukan pada dasarnya UMKM menganggap pembukuan akuntansi dan laporan keuangan adalah faktor penting dalam

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha mereka. Jati et al. (2004) dan Maseko dan Manyani (2011) menyatakan karena keterbatasan pengetahuan akuntansi, kebanyakan UMKM tidak mempunyai pencatatan akuntansi lengkap. UMKM mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan karena rumitnya proses akuntansi dan adanya anggapan bahwa laporan keuangan tidak merupakan hal penting bagi UMKM.

Berdasarkan paparan di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian tentang pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian awal sebelum dilakukan pengembangan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan tindakan pemecahan masalah terhambatnya perkembangan UMKM karena keterbatasan modal.

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang bersifat berdiri sendiri dan berskala kecil yang tahan terhadap dampak krisis perekonomian. Pesatnya perkembangan UMKM membawa dampak positif bagi negara Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkembangan tersebut terlihat dari capaian rasio kewirausahaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 yakni 6,41% dan tercatat UMKM DIY memberi 3,34% GDP. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian di DIY.

Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UMKM memiliki prinsip pemberdayaan, yaitu: 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan; 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Tingginya peran UMKM dalam perekonomian, maka pemerintah memiliki berbagai agenda pemberdayaan UMKM dengan tujuan untuk: 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; 3) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Kriteria UMKM dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Menurut UU No. 20 Tahun 2008, kriteria UMKM dikategorikan berdasar jumlah aset (kekayaan bersih) dan omset (hasil penjualan) tahunan, sebagai berikut:

1. Usaha mikro. Merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
2. Usaha kecil. Merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha menengah. Merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)

Suatu usaha dikelompokkan sebagai UMKM berdasar pada kuantitas tenaga kerja (Badan Pusat Statistik). Usaha mikro memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari 5 orang, usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, dan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Klasifikasi lain adalah menurut ketentuan perpajakan yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013, termasuk pengusaha kecil apabila jumlah peredaran bruto usaha (penjualan) dalam satu tahun tidak melebihi Rp4,8 milyar.

Pentingnya Laporan Keuangan bagi UMKM

Laporan keuangan bagi suatu usaha merupakan salah satu alat untuk mengontrol dan mengawasi kas atas usaha tersebut. UMKM biasanya tidak memisahkan aset, utang, penghasilan, dan pengeluaran perusahaan dengan pribadi. Laporan keuangan dapat mengidentifikasi adanya pemisahan aset usaha dengan aset pribadi (pemiliknya). Pentingnya laporan keuangan tidak hanya sebagai dasar pengambilan keputusan internal usaha yang bersangkutan tetapi juga bermanfaat untuk pihak luar, misalnya sebagai acuan bank pada saat akan memberikan kredit kepada calon nasabah. Laporan keuangan dalam pengertian sempit minimal terdiri atas laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca). Dalam laporan laba rugi, dapat dilihat kinerja atau hasil usaha suatu perusahaan pada periode tertentu, sedangkan kondisi atau posisi keuangan

suatu perusahaan pada saat tertentu dapat dilihat pada neraca. Menurut Harahap (2012), tujuan disusunnya laporan keuangan adalah: 1) *Screening*, yaitu untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan; 2) *Understanding* untuk memahami perusahaan mengenai kondisi keuangan dan hasil usahanya; 3) *Forecasting* untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang; 4) *Diagnosis* untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi keuangan; 5) *Evaluation* untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan.

Menurut para peneliti akuntansi kritis, saat ini akuntansi hanya memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang memiliki modal (kekayaan) dan kekuatan. Akuntansi juga hanya memberikan informasi kepada pihak-pihak tertentu, di mana pihak-pihak ini merupakan pihak-pihak elit (Deegan, 2000). Penelitian tentang pentingnya laporan keuangan pada UMKM menemukan hasil yang berbeda beda. Hasil penelitian Masschuraini (2014) mengungkap bahwa masih banyak pemilik usaha mikro yang belum membuat laporan keuangan. Namun, para informan memahami peran dari laporan keuangan usahanya, yaitu dapat memudahkan bagi pemilik untuk mengetahui pendapatan yang mereka dapatkan. Bagi bank pelaksana KUR, laporan keuangan usaha mikro memiliki peran yang cukup penting bagi analis dan mantri KUR, yaitu dapat menilai kelayakan usaha calon debitur KUR dan mengetahui kemampuan membayar/*Repayment Capability* (RPC) dari calon debitur KUR. Rusham (2012) menyatakan bahwa masalah yang menghadang usaha kecil menyangkut kemampuan akses pembiayaan, akses pasar dan pemasaran, tata kelola manajemen usaha kecil serta akses informasi. Kesulitan usaha kecil mengakses sumber-sumber modal karena keterbatasan informasi dan kemampuan menembus sumber modal tersebut. Lembaga

keuangan bank adalah sumber modal terbesar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil. Namun untuk bermitra dengan bank, usaha kecil dituntut menyajikan proposal usaha yang *feasible* dan menguntungkan. Di samping itu lembaga keuangan bank mensyaratkan usaha kecil harus *bankable* (dapat memenuhi ketentuan bank). Penelitian tentang akuntansi UMKM dilakukan oleh Dharma (2010) dengan temuan yaitu: 1) sebanyak 94 responden atau sekitar 85,5% telah melakukan akuntansi, sedangkan sisanya sebanyak 16 reponden atau sekitar 14,5% belum melakukan akuntansi, 2) dari 94 responden yang melakukan akuntansi, 58 responden atau 61,7% mengaku bahwa yang melakukan akuntansi adalah pemilik; 3) pembuatan dan pengarsipan catatan utang piutang telah dilakukan oleh 77 responden atau sekitar 70%, sedangkan 30% yaitu sebanyak 33 responden belum membuat dan mengarsip catatan utang piutang; 4) responden yang telah membuat dan mengarsip laporan penerimaan dan pengeluaran sebanyak 91 atau sekitar 82,7%, sedangkan sebanyak 19 atau 17,3% belum.

METODE PENELITIAN

Responden penelitian ini adalah UMKM yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dipilihnya pelaku UMKM di DIY dengan pertimbangan bahwa produk yang dihasilkan memiliki variasi produk yang inovatif dan memiliki potensi untuk dikembangkan dan mampu bersaing di pasar internasional. Analisis data yang digunakan untuk tahap pertama yakni pendekatan deskriptif . Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai demografi pelaku UMKM, identifikasi UMKM, perkembangan UMKM, pembukuan pada UMKM, dan pengetahuan UMKM mengenai SAK EMKM. Data pada penelitian ini diperoleh melalui kuesioner dan wawancara yang dilakukan secara langsung bertemu kepada pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. yang terdiri atas

Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Kuesioner yang disebar sebanyak 145 dan yang terisi lengkap sebanyak 64 kuesioner.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Hasil kuesioner yang terkumpul teridentifikasi profil responden. Berdasar tingkat pendidikan, 69% UMKM adalah lulusan SMA/SMK, 17% lulusan lulusan S1, 2% lulusan S2, dan 12% lainnya. Deskripsi lain tentang responden dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi Responden

Uraian	Persentase (%)
Jenis Usaha	
1. Pedagangan	64
2. Manufaktur	9
3. Jasa	19
4. Agrobisnis	6
5. Lainnya	2
Total	100
Lokasi UMKM	
1. Kabupaten Sleman	22
2. Kota Yogyakarta	3
3. Kabupaten Bantul	16
4. Kabupaten Gunungkidul	28
5. Kabupaten Kulonprogo	31
6. Luar DIY	0
Total	100
Jumlah karyawan	
1. < 4 orang	77
2. 5 – 19 orang	23
3. 20 – 99 orang	0
4. >100 orang	0
Total	100
Nilai Aset	
1. < Rp 100 juta	80
2. Rp 100 juta – 499 juta	20
3. Rp 500 juta – 2,5 M	0
4. > 2,5 M	0
Total	100
Jumlah Omzet	
1. < Rp 100 juta	77
2. Rp 100 juta – 499 juta	23
3. Rp 500 juta – 2,5 M	0
4. > 2,5 M	0
Total	100
Sumber dana	
1. > 100% modal sendiri	64
2. 75% - 99% modal sendiri	19
3. 50% - 74% modal sendiri	16
4. < 50% modal sendiri	2
Total	100

Sumber: hasil olah data

Perkembangan Usaha Pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kondisi usaha UMKM di DIY dapat dianalisis dari nilai aset, hasil penjualan, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden bergerak di bidang perdagangan yaitu sebesar 46%. Sementara itu Kabupaten Kulonprogo adalah tempat responden terbanyak (31%). Dilihat dari pengelompokan berdasar BPS, sebagian besar responden adalah usaha mikro dengan jumlah karyawan kurang dari 5 orang yaitu sebanyak 77%. Nilai omset kurang dari Rp100 juta sebanyak 80% dan nilai aset kurang dari Rp100 juta sehingga UMKM yang menjadi responden penelitian ini termasuk kategori usaha mikro

Pemetaan secara menyeluruh ditemukan bahwa kepemilikan aset UMKM di DIY sebagian besar kurang dari Rp100 juta (80%), sedangkan 17% memiliki aset antara Rp100 juta sampai dengan Rp299 juta, 3% memiliki aset antara Rp500 juta sampai dengan Rp2,5 Milyar. Jumlah karyawan sebagian besar di bawah 4 orang yakni sebanyak 73%, hal ini dikarenakan sebagian besar para pelaku UMKM masih melakukan usaha secara perorangan, sehingga semua aktivitas ditangani sendiri oleh pemilik mulai dari produksi, pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Sebagian yang lain yaitu 1% UMKM memiliki karyawan lebih dari 20 orang dan 25% UMKM memiliki jumlah karyawan sebanyak 5 sampai 19 orang.

UMKM yang memiliki penjualan (omset) di bawah Rp100 juta sebanyak 70%, omset antara Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta sebanyak 29%, dan sisanya yaitu 2% UMKM memiliki omset lebih dari Rp500 juta per tahun. Ditinjau dari sisi sumber pendanaan (modal), 57% UMKM DIY modalnya bersumber dari modal sendiri, sedangkan sebanyak 43% UMKM modalnya berasal dari modal sendiri dan dari pihak eksternal. Hal ini sesuai dengan Rahmawati

dan Oktaviani (2017) yang menjelaskan bahwa UMKM cenderung tidak berkembang pesat karena keterbatasan modal. UMKM menjalankan usaha dengan sumber dana dari modal sendiri karena kekhawatiran tidak dapat membayar angsuran dan bunga bank apabila usahanya didanai dari pinjaman kredit bank.

Pembukuan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemetaan UMKM dalam hal pelaksanaan pembukuan dapat dilihat pada Tabel 2. Pemetaan UMKM ini dimaksudkan untuk mengetahui secara rinci kondisi riil yang dialami oleh UMKM berkaitan dengan pembukuan. Hal ini diperlukan untuk dasar penelitian selanjutnya dan sejauh mana masukan bagi pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan-kebijakan khususnya untuk UMKM.

Tabel 2. Pemetaan Pembukuan UMKM

Uraian	Persentase (%)
Melakukan pencatatan akuntansi untuk semua transaksi yang terjadi	64
Tidak melakukan pencatatan akuntansi untuk semua transaksi yang terjadi	36
Total	100
Ada bagian khusus yang melakukan pencatatan akuntansi	20
Tidak ada bagian khusus yang melakukan pencatatan akuntansi	80
Total	100
Memiliki karyawan khusus melakukan pencatatan akuntansi	17
Tidak memiliki karyawan khusus melakukan pencatatan akuntansi	83
Total	100
Melakukan pencatatan akuntansi secara rutin	47
Tidak melakukan pencatatan akuntansi secara rutin	53

Uraian	Persentase (%)
Total	100
Menyusun laporan keuangan secara rutin	50
Tidak menyusun laporan keuangan secara rutin	50
Total	100
Standar akuntansi yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan:	
Standar EMKM	5
Standar ETAP	2
Aturan Perpajakan	14
Lainnya	3
Tidak Tahu	77
Total	100
Neraca (posisi keuangan)	20
Laporan Laba Rugi	38
Laporan Perubahan Modal	3
Laporan Arus Kas	3
Lainnya	36
Total	100
Membuat laporan keuangan menggunakan program aplikasi	2
Membuat laporan keuangan tidak menggunakan program aplikasi	98
Total	100

Sumber: hasil olah data

Tabel 2 menunjukkan bahwa UMKM sebagian besar (64%) melakukan pencatatan setiap transaksi tetapi mayoritas tidak memiliki karyawan khusus untuk melakukan pencatatan (83%), lebih banyak tidak melakukan pencatatan secara rutin (53%); sebagian besar tidak mengetahui pedoman/standar pencatatan akuntansi (77%), laporan keuangan yang paling banyak dibuat adalah laporan laba rugi (38%), sangat minim UMKM yang membuat laporan keuangan dengan bantuan program aplikasi (2%).

Minimnya pengetahuan tentang standar akuntansi keuangan ditemukan oleh Rahmawati dan Puspasari (2017). UMKM tidak memahami standar akuntansi sehingga laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal tersebut berdampak pada gagalnya UMKM mengajukan pinjaman kredit bank. Rudiantoro dan Sylvia (2012) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan UMKM di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM

menyebabkan kualitas laporan keuangan tidak

Meskipun UMKM sudah melakukan pembukuan, namun ternyata sebanyak 52% UMKM tidak membuat laporan keuangan secara rutin. Hal ini dimungkinkan karena yang melakukan pembukuan bukan orang yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Hal ini juga terlihat dari ketidaktahuan orang yang membuat pembukuan mengenai standar akuntansi yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan.

Ditinjau dari tujuan penyusunan laporan keuangan, sebagian besar UMKM sebanyak 45% menyatakan laporan keuangan tersebut untuk keperluan sendiri, sedangkan 45% lainnya menyatakan, pembuatan laporan keuangan untuk pelaporan pajak, sementara hanya 5% UMKM yang menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan untuk pengajuan kredit di bank. Sisanya sebanyak 5% UMKM menyatakan laporan keuangan untuk tujuan lain.

Ditinjau dari tingkat pentingnya laporan keuangan bagi tumbuh kembangnya usaha pelaku UMKM, sebagian besar UMKM yakni sebanyak 63% UMKM menyatakan laporan keuangan sangat diperlukan untuk proses perkembangan usahanya, dan yang menyatakan sangat penting ada sebanyak 29% UMKM, sedangkan sisanya 8% UMKM menyatakan laporan keuangan tidak penting bagi perkembangan usahanya.

Ditinjau dari semangatnya pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan akuntansi dan membuat laporan keuangan bagi usahanya, sebanyak 77% UMKM menyatakan berencana untuk melakukan pencatatan, sementara sebanyak 23% UMKM menyatakan tidak berencana untuk melakukan pencatatan akuntansi .

Ditinjau dari pengetahuan UMKM mengenai SAK EMKM, maka sebagian besar UMKM yakni sebanyak 95% UMKM tidak mengetahui mengenai SAK EMKM, sementara sebanyak 5% mengetahui mengenai SAK

EMKM. Hal ini disebabkan sebanyak 90% UMKM belum pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan mengenai SAK EMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah melakukan pembukuan namun masih sangat terbatas pada pembukuan sederhana. Hal tersebut terlihat dari pengetahuan UMKM mengenai SAK EMKM yang masih terbatas dan tidak adanya karyawan khusus untuk melakukan pembukuan pada UMKM. Pembukuan yang dilakukan UMKM digunakan untuk keperluan terbatas yaitu keperluan internal saja. Pembukuan UMKM untuk keperluan pengajuan kredit bank jarang dilakukan. Peluang fasilitas pemanfaatan dana dari pemerintah dalam bentuk KUR telah terbuka lebar tetapi tidak terserap secara optimal oleh UMKM, yang berarti kendala dalam minimnya modal tidak terselesaikan. Sebagai pihak yang meminjamkan dana, bank berlaku hati-hati. Setiap pinjaman untuk usaha harus melampirkan laporan keuangan, sementara laporan keuangan yang dibuat oleh UMKM tidak *bankable* (sesuai ketentuan bank).

Saran

Berdasarkan pemetaan kondisi usaha dan pembukuan para UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diberikan *problem solving* melalui penelitian eksperimen terhadap permasalahan yang dihadapi para UMKM di DIY dengan diberikan suatu intervensi kepada pelaku UMKM untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Intervensi kepada pelaku UMKM dilakukan dengan menggunakan metode tertentu sehingga menimbulkan motivasi dan kemauan untuk menerapkan model-model yang telah diberikan pada saat intervensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusain, Achmad Sani. 2014. Analisa Kebijakan Permodalan dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Provinsi Bali dan Sulawesi Utara). *Kajian*. Vol. 14 No. 4.
- Baas, Timo & Mechthild Schrooten. 2006. Relationship Banking and SMEs: A Theoretical Analysis. *Small Business Economic* Vol. 27.
- Bisnis UMKM, 2013, Pentingnya HKI bagi UKM <http://bisnisukm.com/pentingnya-hki-bagi-ukm.html>.
- Deegan. 2000. *Financial Accounting Theory*. First Edition. McGraw-Hill. Australia.
- Dharma T Ediraras. 2010. Akuntansi dan Kinerja UKM. <http://www.ejournal.gunadarma.ac.id/>. Diakses tanggal 1 April 2015.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2018. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, PT Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Mikro Kecil dan Menengah. Jakarta
- Inpres No 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jakarta
- Jati, H., B. Bala, dan O. Nisnoni. 2004. Menumbuhkan Kebiasaan Usaha Kecil Menyusun Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis dan Usahawan*, II (8), 210-218.
- Kementerian RI. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

- Maseko, N. and O. Manyani. 2011. Accounting Practices of SMEs in Zimbabwe: An Investigative Study of Record Keeping for Performance Measurement (A Case Study of Bindura). *Journal of Accounting and Taxation*, 3 (8), 171-181.
- Masschuraini, Nuradilla, Oman Rusmana, Warsidi. 2015. Studi Fenomenologi Peran Laporan Keuangan Dalam Memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Makalah*. Dipresentasikan pada SNA XVII, Lombok.
- Rahmawati, Teti dan Oktaviani Rita Puspasari. 2017. Implementasi SAK ETAP dan Kualitas Laporan Keuangan UMKM Terkait Akses Modal Perbankan. *Jurnal Kajian Akuntansi*. Vol. 1. <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka>.
- Riani, 2012. Identifikasi Permasalahan dan Kerangka Pengembangan Kluster UMKM Sandang di Bukittinggi Sumatera Barat. *TINGKAP*. Vol. VII. No. 1 Th. 2011
- Rudiantoro, Rizki & Sylvia Veronica Siregar. 2011. Kualitas Laporan Keuangan UMKM dan Prospek Implementasi SAK ETAP. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*. Aceh
- Rusham. 2012. *Analisis Pemetaan dan Penanggulangan Permasalahan Pelaku Ekonomi Lemah (UMKM) Terhadap Peningkatan Daya Saing Usaha dalam Memanfaatkan Potensi Ekonomi Lokal Di Kabupaten Bekasi*.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.